

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini telah memasuki babak baru dalam bermasyarakat, babak baru ini ditandai dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah untuk dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur di daerah untuk memanfaatkan potensinya.² Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta menekankan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan. Diberlakukannya otonomi daerah ini pemerintah bisa mengolah dan membuat keputusan sendiri yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar, pemerintah daerah juga dituntut untuk mandiri dan kreatif dalam mencari sumber-sumber peluang yang dapat dijadikan sumber pemasukan pendapatan daerah.

Pemberian otonomi daerah diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: PT UPFE-UMY,2007), hal 143

kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang lebih baik lagi. Selain itu dengan otonomi daerah yang luas diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, kekhususan, dan keistimewaan serta keaneragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak positif dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah tugas-tugas yang telah diberikan kepada pemerintah daerah akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat didaerah sudah memahami betul bagaimana kebutuhan masyarakat, seperti konteks dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, sumber daya dan sumber biaya yang dimilikinya.³

Demi terselenggaranya otonomi daerah secara optimal, maka telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5, sumber dari penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan lain yang sah⁴. Untuk mengoptimalkan otonomi daerah pemerintah daerah harus mengoptimalkan besarnya pendapatan yang akan diterima daerah.

³ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, (vol 16 no 1 2019), dalam <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130>, diakses 4 September 2023

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pada pemerintah untuk pelaksanaan desentralisasi ini terdiri dari Pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil BUMD, yang kedua dana perimbangan, selanjutnya ada pinjaman daerah dan yang terakhir yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang ada di daerahnya. Namun, kebutuhan akan peningkatan belanja pemerintah daerah atau kabupaten/kota ini tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi diperlukan juga transfer dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk menutupi kebutuhan dari belanja daerah.

Dana perimbangan ini diperoleh dari pendapatan APBN yang diberikan dan termasuk komponen terbesar dalam alokasi yang diberikan ke daerah. Dengan adanya dana perimbangan ini dimaksudkan agar dapat membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, serta bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pemerintah antar daerah dan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan pemerintah

daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan ini diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang diterimanya agar nantinya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk melaksanakan belanja daerah.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD dan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah ini dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran belanja yang akan digunakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Sedangkan Pengeluaran rutin adalah pengeluaran belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Surbakti semakin besar perolehan pendapatan asli daerah disuatu daerah maka semakin besar pula anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini merupakan tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah, artinya jika perekonomian daerah mengalami

pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD)⁵.

Menurut Sanusi dan Yusuf, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran belanja daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, PDRB (Produk Domestic Regional Bruto), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan IPM⁶. Menurut Kartika dan wantara, kemampuan suatu daerah untuk melakukan melakukan belanja daerah dipengaruhi oleh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan Asli daerah itu sendiri⁷.

Sedangkan menurut Wahyuni, semakin besar alokasi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau alokasi dana perimbangan maka akan cenderung meningkatkan anggaran belanja daerah⁸. Dengan besarnya alokasi dana perimbangan ini pemerintah daerah dapat mendanai program-program kerja yang telah direncanakan guna menciptakan perekonomian yang maju dan untuk mensejahterahkan rakyat.

⁵ Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", (vol 17 no1, 2014), *jurnal telaah akuntansi*, hal 77

⁶ Sanusi, A dan M. Yusuf, "Pengaruh PAD, PDRB, Jumlah Penduduk, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 pendekatan panel regression", (Vol 3 no 1, 2015) *Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik*, hal 50-60

⁷ Kartika T dan I. A wantara, "Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dan kemungkinan terjadi Flypaper effect di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Vol 2 no 2, 2015), *Jurnal Ilmu Ekonomi*, hal 10

⁸ Husna Wahyuni, Skripsi, "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar". (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021), hal 59

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengalokasian belanja daerah ini sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah atau pendapatan yang diterima dari pemerintahan pusat seperti Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pengalokasian belanja daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterahkan masyarakatnya.

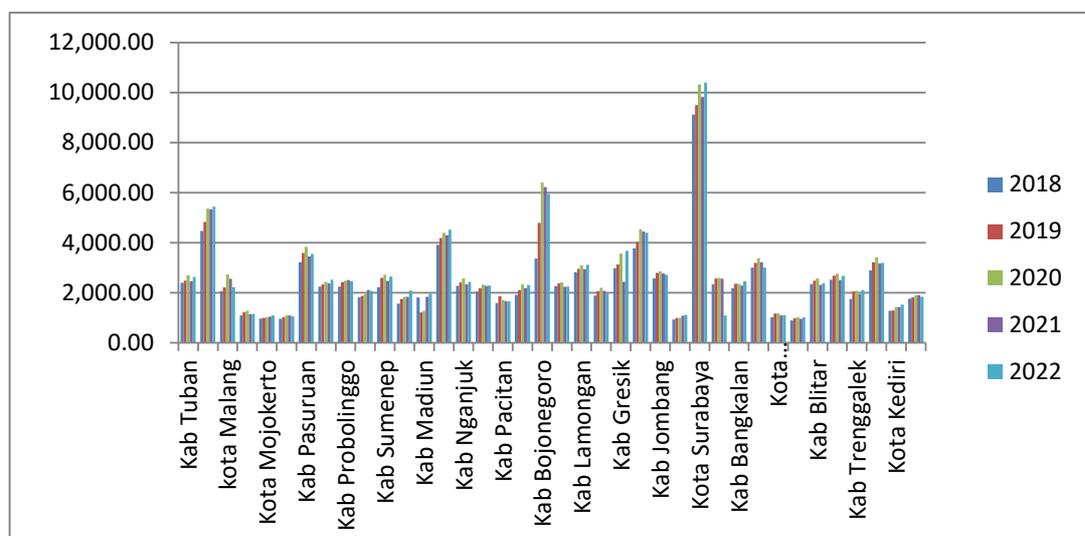
Besar kecil potensi yang dimiliki daerah, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi pula. Hal ini kembali lagi pada bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten dan kota yang mempunyai berbagai wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, yang meliputi sektor industry, kelautan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Banyaknya potensi daerah yang dimiliki diharapkan wilayah Jawa Timur ini dapat mengalami kenaikan dalam pendapatan-pendapatan yang diterimanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Jawa Timur mempunyai jumlah penduduk paling banyak nomor dua setelah Jawa Barat dan menjadi peringkat dua tingkat provinsi di Indonesia. Kabupaten/Kota se Eks

Karisidenan Kediri ini selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan namun jumlahnya berbeda-beda di setiap daerah, dengan kenaikan jumlah penduduk ini memiliki peran penting untuk daerah, dimana pertambahannya akan menciptakan adanya peluang usaha dan lapangan kerja sehingga penduduk akan turut andil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diwilayah masing-masing Kabupaten/Kota.

Berikut Tabel Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Anggaran Belanja Daerah yang diterima oleh Jawa Timur Pada Tahun 2018-2022

Grafik 1.1
Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

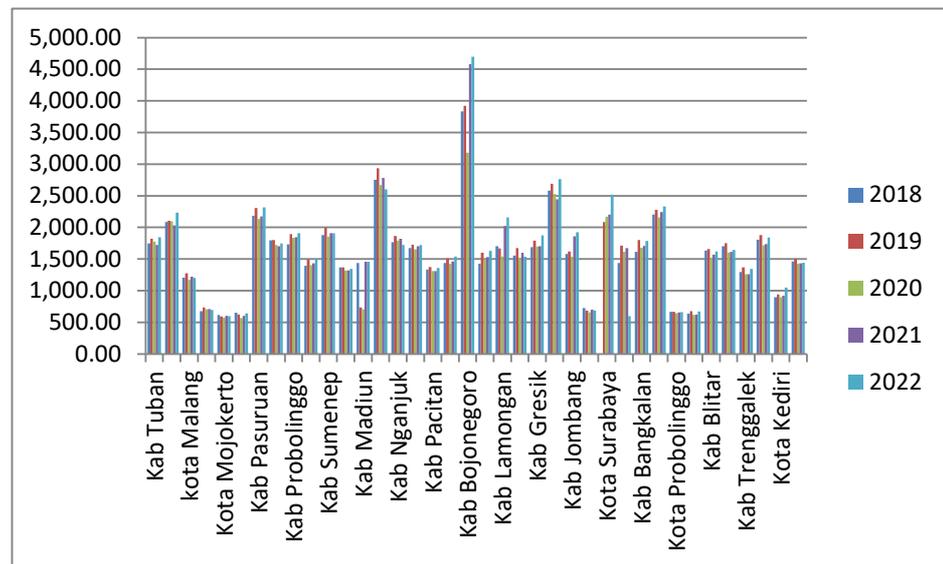


Berdasarkan grafik diatas Kota Surabaya menempati posisi Anggaran Belanja Daerah tertinggi se Jawa Timur, namun untuk Anggaran Belanja Daerah di Kota Surabaya ini mengalami penurunan ditahun 2021 dan kembali

naik di tahun 2022. Sedangkan pada Provinsi Jawa Timur ini yang mengalami kenaikan Anggaran Belanja Daerah setiap tahunnya terdapat pada Kota Mojokerto, Kab Situbondo, Kota Batu dan Kota Kediri. sedangkan untuk Kab/kota lainnya belum stabil, masih mengalami kenaikan dan penurunan.

Grafik 1.2

Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur

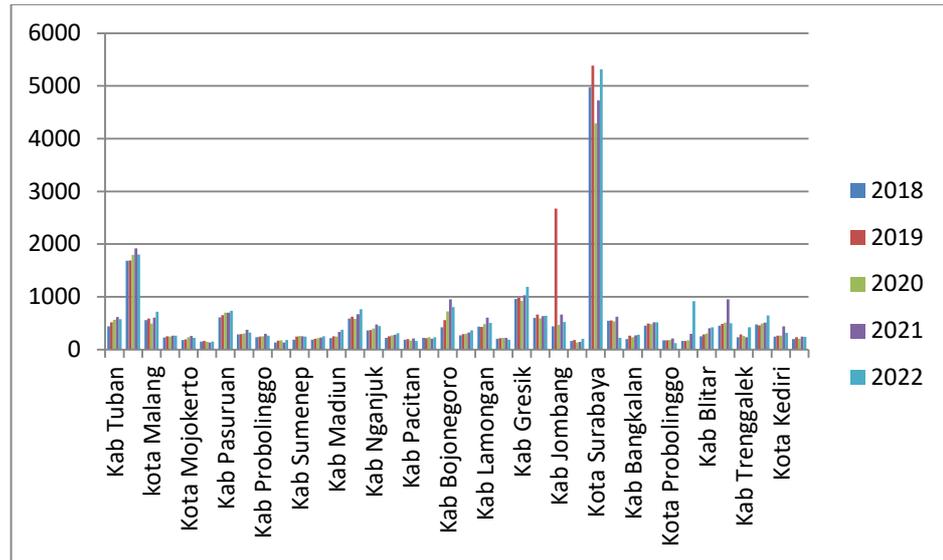


Berdasarkan grafik diatas realisasi dana perimbangan tertinggi berada di Kab Bojonegoro, pada Kab Bojonegoro ini sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 namun di tahun 2021 Kab Bojonegoro mengalami kenaikan yang cukup tinggi, begitu juga di tahun 2022 realisasi dana perimbangan kembali meningkat bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian realisasi dana perimbangan terendah di Provinsi Jawa Timur berada pada Kota Mojokerto dan pada Kab/Kota lainnya

realisasi dana perimbangan belum stabil realisasinya masih mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.

Grafik 1.3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan grafik 1.2 Provinsi Jawa Timur belum mampu menyeimbangkan besarnya PAD yang diterimanya oleh setiap wilayah dari 38 Kabupaten atau Kota. Tingkat pertumbuhan PAD sangat berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Realisasi PAD yang paling tinggi berada di Kota Surabaya dan realisasi PAD terendah berada di Kab Sampang. Sedangkan dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 Kab/Kota yang realisasinya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu Kab Pasuruan, Kab Situbondo, Kab Madiun, Kab Ngawi, Kab Lumajang, Kota Blitar dan Kab Blitar.

Dari 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengalami kenaikan realisasi PAD dari tahun 2018-2022, Kota Blitar merupakan salah satu Kota yang mengalami kenaikan PAD yang sangat tinggi. Dimana pada tahun 2018 realisasi PAD Kota Blitar sebesar 163.03 M, Tahun 2019 sebesar 166.14 M, tahun 2020 sebesar 174.59 M, Tahun 2021 sebesar 297.62 M dan yang paling besar di Tahun 2022 yaitu sebesar 918.57 M. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Anggaran Belanja Daerah pada Kota Blitar juga mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran Belanja Daerah ini merupakan komponen yang sangat penting untuk dijalankan di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mendorong Percepatan perekonomian daerah. Meningkatnya Anggaran Belanja Daerah juga akan meningkatkan Belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memaksimalkan program kerja yang dilakukan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

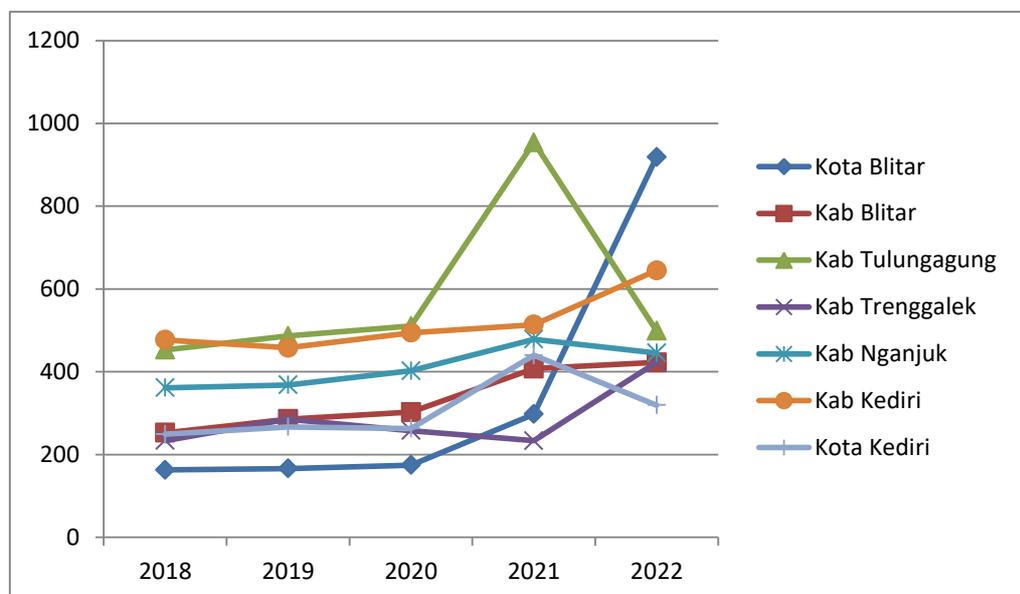
Kota Blitar merupakan salah satu Kota yang berada di Eks Karisidenan Kediri. Eks Karisidenan Kediri adalah sebuah wilayah administratif berbentuk karisidenan yang terletak di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri memiliki ketersediaan potensi sumber daya alam yang besar. Antara lain seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Dengan sebuah inovasi yang lebih baik akan mengarahkan pada kemandirian dalam mengelola keuangan di

daerahnya. Hasil dari pemanfaatan potensi tersebut dengan baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakatnya. Dimana dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Berikut gambar grafik PAD, Dana Perimbangan dan Anggaran Belanja Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri.

Grafik 1. 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 7 Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)



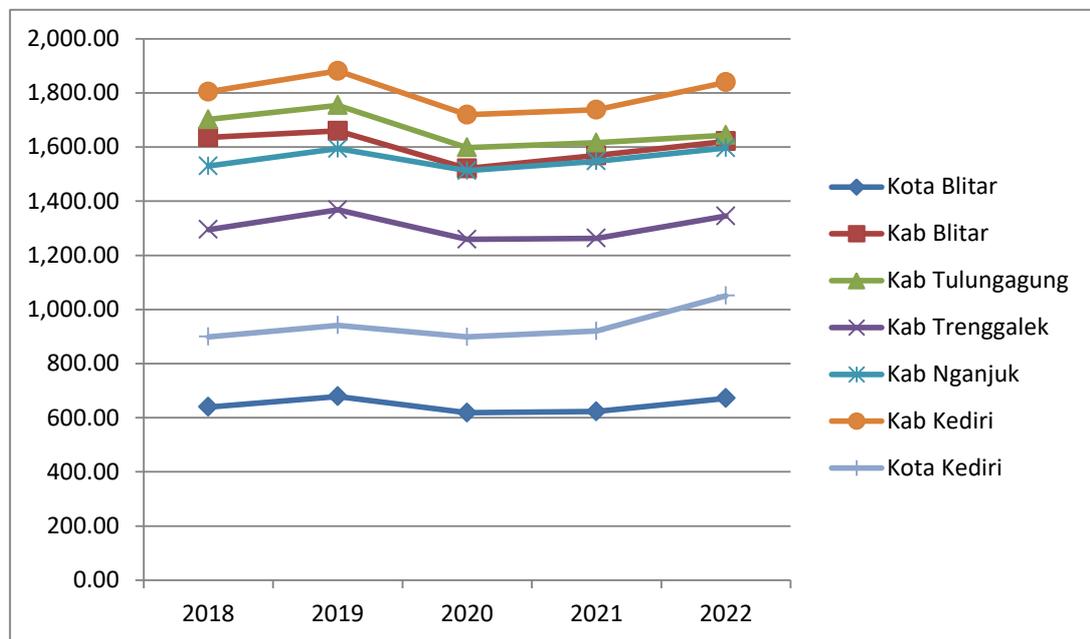
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh melalui DJPK Realisasi PAD pada 7 Kabupaten/Kota ini mengalami kenaikan dan penurunan, Kota yang

mengalami yang mengalami kenaikan pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah Kota Blitar, Kota Blitar ini setiap tahunnya terus mengalami kenaikan dalam realisasi PAD nya. Sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya masih naik turun dalam realisasi PAD yang didapatkan.

Grafik 1. 5

Realisasi Dana Perimbangan 7 Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)



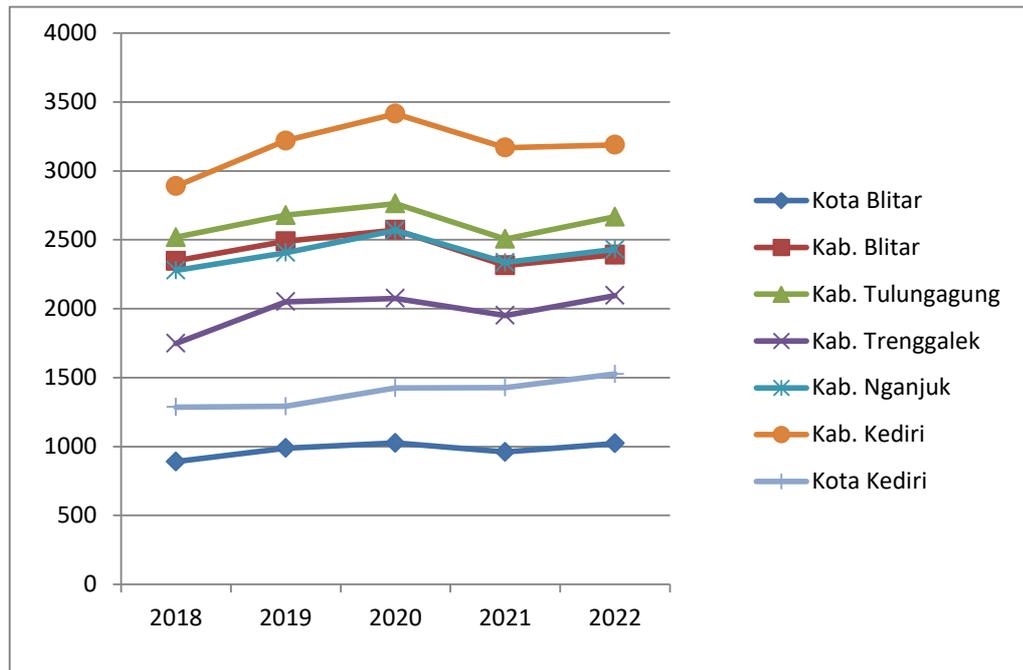
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh melalui DJPK Realisasi DAU pada 7 Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri ini yang memiliki nilai Dana Perimbangan terbesar daripada Kabupaten/kota lainnya yaitu Kab Kediri, realisasi dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang berjumlah 1,880.68 M. dan realisasai terendah dana perimbangan terdapat pada Kota

Blitar, dimana realisasi dana perimbangan yang terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah realisasi sebesar 618,57 M.

Grafik 1. 6

Anggaran Belanja Daerah 7 Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)



Berdasarkan grafik diatas Anggaran Belanja Daerah di 7 Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan. Anggaran Belanja Daerah yang paling tinggi yaitu pada Kabupaten Kediri, sedangkan Kota Blitar menepati Anggaran Belanja Daerah yang terendah.

Sedangkan berdasarkan grafik 1.4 Realisasi PAD dan 1.5 Realisasi Dana Perimbangan, pada tahun 2018 dan 2019 Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Anggaran Belanja Daerah Kab/Kota se Eks Karisidenan sama-sama mengalami kenaikan, namun berbeda dengan Kota Kediri pada tahun 2018 sampai 2019, Anggaran Belanja Daerah nilainya sama tidak ada kenaikan maupun penurunan.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, untuk Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 pada Kota Blitar, Kab Blitar, Kab Tulungagung, Kab Kediri, dan Kab Nganjuk mengalami kenaikan, namun pada Kota Kediri Realisasinya tetap tidak mengalami kenaikan, sedangkan Kab trenggalek mengalami penurunan pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 sampai 2022 Anggaran Belanja Daerah pada 7 Kab/Kota mengalami kenaikan, namun realisasi PAD Pada Kab Tulungagung, Kota Kediri dan Kab Nganjuk mengalami penurunan, selain itu Kab/Kota Lainnya sama-sama mengalami kenaikan. Dan untuk Realisasi Dana Perimbangan KAb Nganjuk mengalami penurunan ditahun 2021-2022, namun untuk Kab/Kota yang lainnya mengalami kenaikan di tahun 2021-2022.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa pada Eks Karisidenan ini ketika Anggaran Belanja Daerah naik realisasi PAD dan

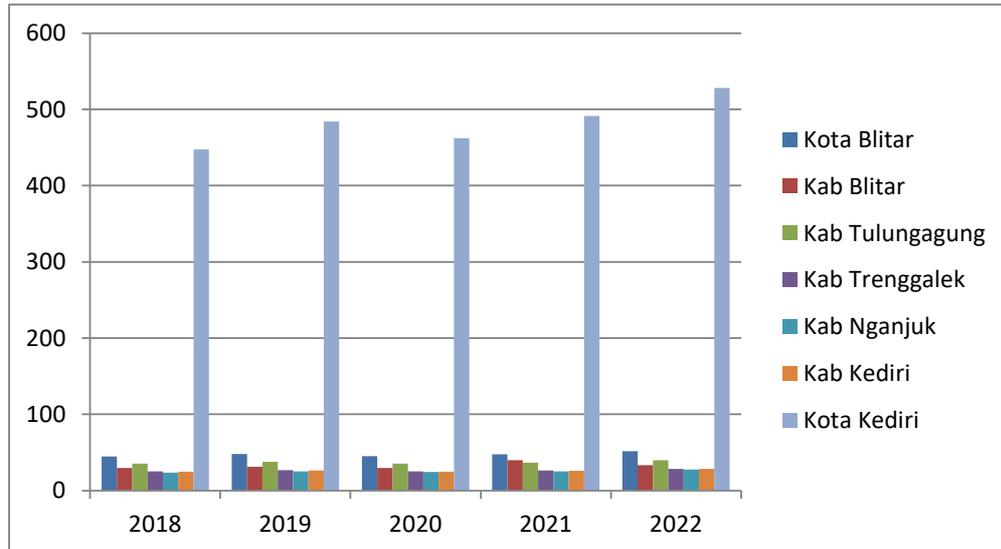
Dana Perimbangan masih ada beberapa Kab/Kota yang mengalami penurunan, sedangkan menurut Surbakti dan Wahyuni, PAD dan Dana Perimbangan merupakan faktor yang mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah, Jika Pad dan Dana Perimbangan meningkat maka Anggaran Belanja Daerah akan ikut meningkat juga. Namun dari data yang diperoleh tidak demikian. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di Kab/Kota di Eks Karisidenan Kediri, seperti hal nya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kab/Kota masing-masing yang tidak sama.

Kondisi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di masing-masing Kabupaten/Kota se Eks Karisidena Kediri ini dapat diketahui dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi diseluruh wilayah. Dengan meningkatnya PDRB yang dihasilkan akan menambah penerimaan pemerintah dan dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akan meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pendapatan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri antara Lain

Grafik 1. 7

**Pendapatan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan
Kediri Tahun 2018-2022**



sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Data diolah Tahun 2023

Meningkatnya PDRB suatu daerah, akan menuntut penyediaan anggaran belanja daerah, di mana PDRB sendiri dipengaruhi oleh besarnya faktor diantaranya semakin banyaknya jumlah penduduk disuatu daerah. Selain mempengaruhi PDRB juga akan mempengaruhi anggaran belanja daerah. Maka dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu akan mempengaruhi besaran anggaran belanja daerah itu sendiri.

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Kota Kediri memiliki PDRB yang sangat tinggi jauh dari Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan lainnya. maka pajak daerah di Kota Kediri pun ikut tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, sehingga penerimaan Anggaran Belanja Daerah pada Kota Kediri pun akan ikut meningkat tinggi, namun untuk realisasi

PDRB Kabupaten/Kota lainnya sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Kediri. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini merupakan masalah yang sering terjadi akibat akselerasi pembangunan yang tidak berimbang. Disatu sisi, daerah dengan kapasitas dan sumber daya ekonomi mapan dengan mudah mencatat pertumbuhan, sementara daerah yang minim sumber ekonomi sulit untuk membuat pertumbuhan yang positif.

Dampak dari adanya ketimpangan ekonomi sangat penting untuk diperhatikan. Ketidakstabilan sosial. Ketidakadilan ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi adalah beberapa konsekuensi yang sering terkait dengan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini dapat memicu ketegangan sosial, tidak puasnya masyarakat dan dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meningkatnya PDRB suatu daerah, akan menuntut penyediaan anggaran belanja daerah, di mana PDRB sendiri dipengaruhi oleh besarnya faktor diantaranya semakin banyaknya jumlah penduduk disuatu daerah. Selain mempengaruhi PDRB juga akan mempengaruhi anggaran belanja daerah. Maka dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu akan mempengaruhi besaran anggaran belanja daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana**

Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 ?
3. Apakah Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022

2. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018- 2022
3. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri Tahun 2018-2022

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, terutama pada kajian mata kuliah Akuntansi Syariah Sektor Publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi instansi Pemerintah Daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, intelektual bagi para pengembang keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik dan juga pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini disajikan sebagai subjek penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2). Sedangkan Variabel dependennya yaitu Anggaran Belanja Daerah (Y). populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri tahun 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini perlu terdapat batasan tertentu yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan hasil dapat lebih akurat, karena yang diteliti lebih spesifik tidak menyeluruh. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan masalah. Belanja Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pajak

Daerah, Jumlah Penduduk dan Retribusi Daerah. Agar pokok pembahasan lebih terperinci maka keterbatasan penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah.

F. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu dijabarkan satu-persatu guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman bahasa dalam penelitian ini. Yaitu penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dan istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti.

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Kesimpulannya pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari seperti pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah yang digunakan untuk menghitung kemandirian keuangan di daerah tersebut.

b. Dana Perimbangan

Menurut Siregar Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁹

Dana perimbangan ini merupakan transfer dana terbesar yang dialokasikan ke pemerintah daerah. Dana yang dialokasikan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.

Tujuan dari adanya dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai program kerja yang dilaksanakan dan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

c. Anggaran Belanja Daerah

Menurut Pekei, Anggaran Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang dalam satu periode.

Anggaran Belanja Daerah ini digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang

⁹ Badric Siregar, "Akuntansi Sektor Publik" (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2015), hal 31

akan datang, sebagai sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja dan sebagai alat untuk motivasi para pegawai

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk pemahaman terkait penjelasan dari judul penelitian supaya tidak ada lagi beberapa penafsiran pada judul penelitian, yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Anggaran Belanja Daerah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang mendasari penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah, berikut dikemukakan sistematika yang akan dipaparkan secara rinci dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini terdapat enam bab, antara lain

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang memuat variabel X yang memuat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta variabel Y Anggaran Belanja Daerah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian serta Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji data yang telah didapat dengan menggunakan E-Views dan setelah hasil pengolahan data kemudian pembahasan yang mencakup variabel.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan meliputi analisis dan perhitungan hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada. Pembahasan dalam bab ini ialah analisis hasil temuan lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang bahan rujukan atau sumber-sumber yang dipakai dalam penulisan. Yang isinya memuat nama penulis, judul tulisan, penerbit, tahun terbit dan lain-lain.